

Keterkaitan RPJMD dan RPJMN



Rapat Koordinasi PP39/2006
SS1 Bappenas-Jakarta, 29 Januari 2015

Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Dokumen Perencanaan
- RPJMN 2015-2019
- Pedoman Pelaksanaan Harmonisasi RPJMD dan RPJMN



Dokumen Perencanaan

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)



RPJMN 2015-2019

Sumber: Perpres 5/2015



Dasar Hukum

Penyusunan RPJMN 2015-2019

1. UU 25/2004 tentang SPPN:

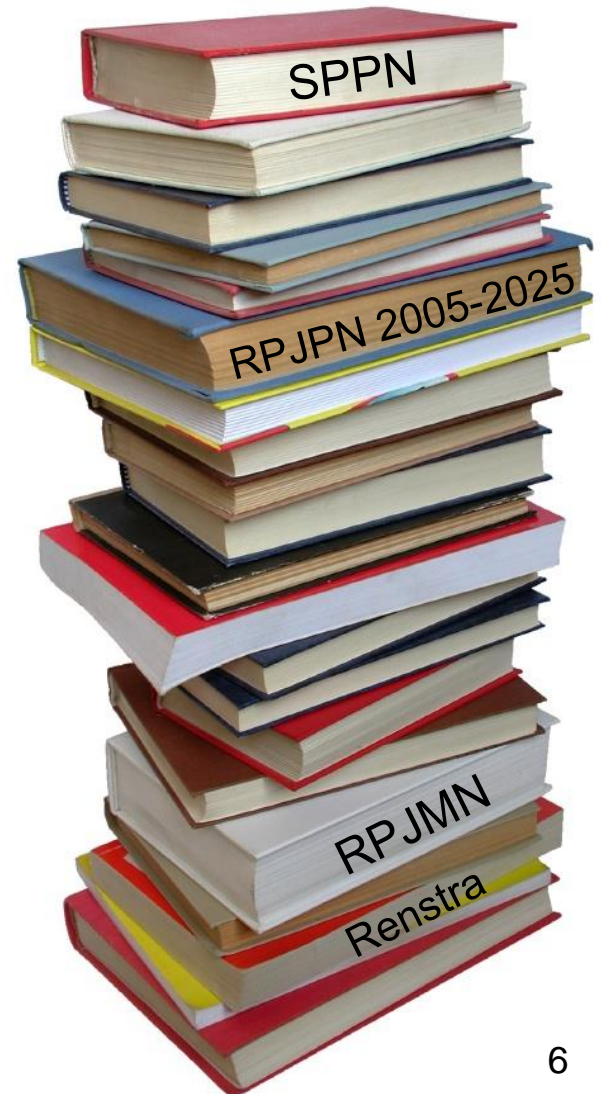
Pasal 19 ayat 1:

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik.

2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025

Arah pembangunan untuk RPJM ke-3 (2015-2019):

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.



Dokumen RPJMN 2015-2019



BUKU I: AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pendahuluan
2. Kondisi Umum
3. Lingkungan Strategis
4. Kerangka Ekonomi Makro
- 5. Kebijakan Pembangunan Nasional**
6. Agenda Pembangunan Nasional
7. Kaidah Pelaksanaan

BUKU II: AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
2. Pembangunan SOSBUD dan Kehidupan Beragama
3. Ekonomi
4. Bidang IPTEK
5. Bidang Politik
6. Bidang HANKAM
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang Penyediaan SARPRAS
10. Bidang Pengelolaan SDA dan LH

BUKU III: AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH

1. Wilayah Nasional
2. Wilayah Papua
3. Wilayah Maluku
4. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
5. Wilayah Pulau Sulawesi
6. Wilayah Pulau Kalimantan
7. Wilayah Pulau Jawa -Bali
8. Wilayah Pulau Sumatera

Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan **kualitas hidup manusia Indonesia** yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

NAWACITA - 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup **Manusia dan Masyarakat** Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Trisakti

I. Berdaulat dalam Bidang Politik

1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Menguatkan sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Trisakti

II. Berdikari dalam Bidang Ekonomi

1. Mendedikasikan diri untuk pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.

Trisakti

11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

III. Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

Keterkaitan Visi-Misi, Nawacita, dan Trisakti

VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera	Bangsa berdaya saing	Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
---	--	--	--	----------------------	--	--

NAWACITA – 9 Agenda Prioritas

Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Akan melakukan revolusi karakter bangsa	Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
--	---	---	---	--	--	--	---	---

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 Program Aksi-115 Prioritas Utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 Program Aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 Program Aksi)

<ol style="list-style-type: none"> Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) Menguatkan sistem pertahanan negara (4) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) 	<ol style="list-style-type: none"> Dedikasikan pembangunan kualitas SDM Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun pemberdayaan buruh Membangun sektor keuangan berbasis nasional Penguatan investasi domestik Membangun penguatan kapasitas fiskal negara Membangun infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun ekonomi maritim Penguatan sektor kehutanan Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan Membangun perimbangan pembangunan kawasan Membangun karakter dan potensi wisata Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional Pengembangan industri manufaktur 	<ol style="list-style-type: none"> Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 	<ol style="list-style-type: none"> Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga
---	--	---	--	---	--	---	--	--

Strategi Pembangunan

NORMA PEMBANGUNAN

- 1) Membangun untuk **manusia dan masyarakat**;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA



Pedoman Pelaksanaan Harmonisasi RPJMD dan RPJMN



Latar Belakang

1. Jadwal dan alur penyusunan perencanaan di Pusat dan Daerah yang tidak sama
2. Masih ditemukannya ketidaksinkronan dokumen perencanaan di Pusat dan Daerah
3. Beberapa sasaran pembangunan nasional yang belum didukung oleh perencanaan di daerah
4. Belum adanya panduan teknis *bilateral meeting* penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN 2015-2019 (Permen PPN No. 1/2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019)

Landasan Hukum

1. UU 25/2004 menyebutkan, tujuan SPPN:
 - mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
 - menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
2. UU 23/2014 menyebutkan bahwa:
 - RPJMD berpedoman kepada RPJMN
3. PP 40/2006 Pasal 17 menyebutkan bahwa:
 - RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah
4. Peraturan Menteri PPN No. 1/2014 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019.

Tujuan Strategis

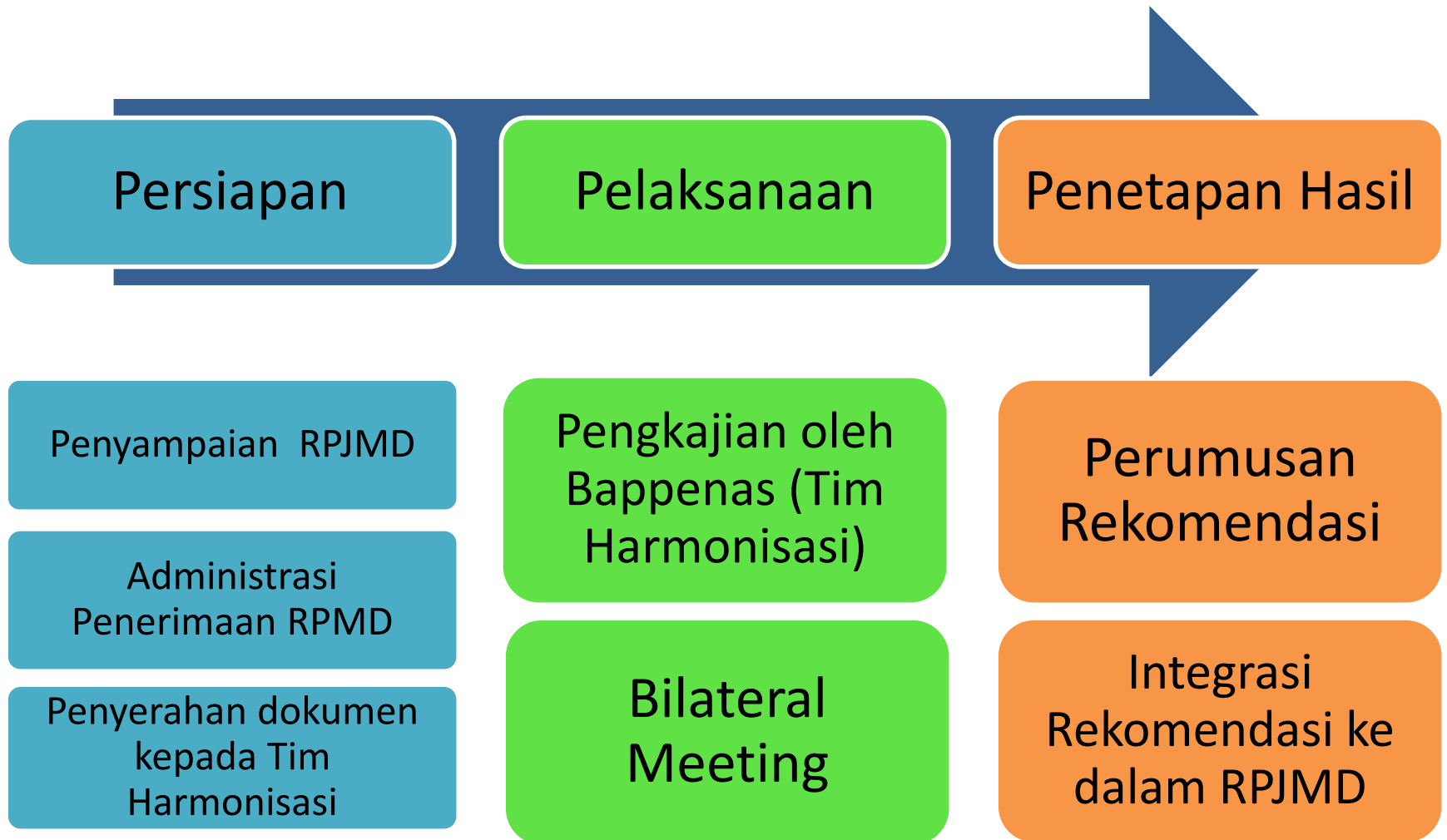
- Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah melalui:
 - Terwujudnya RPJM Daerah yang harmonis dengan RPJMN tahun 2015-2019;
 - Menjamin sinkronisasi arah kebijakan dan sasaran pokok di dalam RPJMN tahun 2015-2019 dengan kebijakan dan sasaran di dalam RPJM Daerah;



Sistematika RPJMD Saat ini

- Bab I: Pendahuluan
- Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- Bab IV: Analisis Isu-Isu Strategis
 - Permasalahan Pembangunan
 - Isu Strategis
- Bab V: Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI: Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VII: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII: Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
- Bab IX: Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan



Ruang Lingkup Harmonisasi

RPJMD

Tujuan dan Sasaran
(Bab V)

?

?



RPJMN

Sasaran Pokok
Pembangunan Nasional
(Buku I)

Tema Pengembangan
Wilayah (Buku III)

Tujuan Pengembangan
Wilayah (Buku III)

Instrumen Harmonisasi

Tujuan dan Sasaran



Sasaran Pokok
Pembangunan Nasional

Indikator	Target di dalam RPJMD	Target di dalam RPJMN
Indikator Makro		
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		

*) Ketiga indikator sasaran diatas (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, & Tingkat Kemiskinan) sudah terdapat target per tahun per provinsi di dalam RPJMN 2015-2019

Contoh Sasaran Pokok RPJMN yg Belum dijabarkan Per Provinsi/Tahun

Indikator		Target di dalam RPJMD	Rekomendasi Target
I. Sasaran Makro			
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
1	Indeks Pembangunan Manusia		
2	Indeks Pembangunan Masyarakat		
3	Indeks Gini		
4	Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		
Dst...			

Catatan:

- Apabila mekanisme ini ingin dilaksanakan, dibutuhkan target sasaran per tahun per provinsi
- kesepakatan target sasaran utk masing2 provinsi dapat dibahas di dalam Bilateral Meeting

?



Tema Pengembangan Wilayah

Wilayah	Tema Pengembangan
Papua	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;• Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari;• Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati• Dst ...
Maluku	<ul style="list-style-type: none">• Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional• Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan• Dst ...
dst...	

?



Tujuan Pengembangan Wilayah

Wilayah	Tujuan Pengembangan
Nusa Tenggara	<ol style="list-style-type: none">pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga;penyediaan infrastruktur wilayah;peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
Sulawesi	<ol style="list-style-type: none">pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari;penyediaan infrastruktur wilayah;peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
Sumatera	<ol style="list-style-type: none">pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;Dst...
Dst...	



Terima Kasih